

BAB V

RRI-GORONTALO

5.1 RRI Gorontalo Terbentuk

Lembaga penyiaran publik (LPP) RRI menurut UU RI No. 32 Tahun 2002 adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan Negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Demikian jelaslah bahwa RRI Gorontalo termasuk dalam Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tersebut¹.

Dalam Pasal 2 UU No 32 Tahun 2002 dinyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.

Selanjutnya menurut Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

¹ Sumber digunakan data awal yang ditemukan di RRI pada saat observasi *Sejarah Siangkat Berdirinya RRI Gorontalo* tanggal 1 Oktober 2013 hari selasa pukul 10:35

Sebagai lembaga penyiaran publik menurut Pasal 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republic Indonesia mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi,

Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

5.1.1 Sejarah Singkat LPP-RRI Gorontalo.

Berbicara soal sejarah berdirinya RRI Gorontalo, sudah pasti tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan daerah itu sendiri. Untuk pertama kalinya RRI Gorontalo secara resmi mengudara pada Tanggal 16 Agustus 1959 dan operasi siaran luar yang pertama kalinya Tanggal 15 Oktober 1959. menurut catatan sejarahnya, pendirian RRI Gorontalo melalui suatu perjuangan yang cukup berat dan syarat tantangan, mengingat pada masa-masa tersebut adalah pergolakan dimana sejak tahun 1957 sampai dengan 1958, daerah Sulawesi Utara-Tengah termasuk Gorontalo, merupakan daerah pergolakan sebagai akibat dari gerakan pemberontakkan PRRI / Permesta terhadap pemerintah pusat RI. Sebagai suatu gerakan, pemerintahan Permesta (demikian mereka menamakan dirinya) di daerah Sulutteng ini, selain mempertahankan diri dengan kekuatan dan perlengkapan militer yang diperoleh dari barter-system, juga menjalankan psy-war melalui media radio.

Sebelum RRI Gorontalo mengudara pada tahun 1958 sebagaimana dikemukakan diatas, PRRI / Permesta pada tahun telah mendirikan sebuah studio

yang diberi nama radio pemerintah PRRI / Permesta pada tahun 1957. media radio tersebut digunakan sebagai alat propaganda menggalang kekuatan untuk melawan pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta pada waktu itu. Pada tahun 1958, gerakan PPRI / Permesta yang sifatnya mengancam keutuhan wilayah NKRI ini secara spontan mendapat perlawanan rakyat Gorontalo dibawah pimpinan Nani Wartabone. Pada Tanggal 19 Mei 1958, pasukan rakyat Gorontalo dibawah pimpinan Nani Wartabone tersebut bergabung dengan pasukan yang dikirim oleh pemerintah pusat antara lain Batalyon 512 Brawijaya dibawah Komando Kapten Piola Isa dan kemudian memasuki Kota Gorontalo.

Selama Tahun 1958 daerah Gorontalo dijadikan basis operasi MERDEKA II yang bertugas pertama, melakukan tekanan fisik kepada PRRI / Permesta dan kedua, membina kesadaran dan pemahaman NKRI kepada rakyat di daerah-daerah baik yang pernah atau masih menduduki PRRI / Permesta, seperti Boolang Mongondow dan Minahasa.

Pelaksanaan tugas kedua yang merupakan operasi mental spiritual tersebut dirasakan sangat berat oleh aparaturn pemerintahan baik sipil maupun militer pada waktu itu. Dalam keadaan sulit tersebut, radio adalah merupakan satu-satunya alternatif yang dapat digunakan sebagai alat perjuangan pada saat itu. Menyadari hal ini, maka dibentuklah suatu panitia yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Gorontalo yang bertugas memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar Gorontalo mendapat jatah studio RRI. Panitia tersebut terdiri dari : R. Atje Slamet (kepala daerah Sulawesi Utara pada waktu itu) selaku ketua, A. W Thayib (unsur

masyarakat) selaku wakil ketua dan S. Manangka (kepala jawatan penerangan kabupaten Gorontalo pada waktu itu) selaku sekretaris.

Masih pada tahun 1958, selaku delegasi pemerintah daerah Gorontalo, panitia tersebut ternyata berhasil mendapatkan tanggapan positif dari departemen penerangan dari RRI pusat untuk mendirikan RRI Gorontalo. Dalam hal ini Koma Alamri (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

“Saya diperintahkan Bupati Gorontalo waktu itu, Bapak Syamsul Biya, untuk menyiapkan pendirian RRI di Gorontalo. Dalam hal ini soal dana pembangunannya”. Tokoh yang mengaku telah melewati empat zaman di Republik ini, yaitu dari zaman perjuangan hingga Reformasi saat ini mengakui, bahwa RRI Gorontalo pada awal mulanya dibangun dengan dana hasil barter yang dikeolanya waktu itu, sebagai seorang kepercayaan pemerintah daerah. “Karena saya yang memegang, istilahnya *Finest* atau semua bahan-bahan barter dari luar negeri itu di Gorontalo. Bahan-bahan itu sesudah di jual, uangnya harus saya setor ke pemerintah daerah untuk membayar gaji dan sebagainya, sekaligus saya diperintahkan menyiapkan dana pembangunan RRI Gorontalo di Kampung Tenda (RRI lama)”, kenang Koma Alamri. Menurut Koma, setelah dana disiapkan, pada tahun 1957 dimulai pembangunannya. “kalau tidak salah kontraktornya waktu itu CV. Firma Nusantara dibawah pimpinan Saleh Alhadar”, tambahnya.

Dengan menggunakan sebuah gedung studio bekas radio PRRI / Permesta dan kemudian melengkapinya dengan peralatan pemancar dan studio untuk penyiaran, RRI Gorontalo berhasil didirikan dan mengudara secara resmi untuk pertama kalinya pada Tanggal 16 Agustus 1959.

RRI yang lahir 25 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, awalnya diposisikan sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Puluhan stasiun radio yang menjadi embrio lahirnya RRI. Bahkan kurang lebih 20 tahun lamanya RRI menempati posisi penting dan strategis.

Disaat Indonesia mengalami masa kelam, yaitu pecahnya pemberontakan G 30 S PKI, RRI sebagai lembaga penyiaran milik pemerintah yang sah berperan menggaungkan gelora semangat kemenangan orde baru atau rezim pemerintahan sebelumnya, mempertahankan nilai-nilai murni Pancasila dan UUD 1945 sesuai konsep perjuangan orde baru.

Gorontalo pada tahun 1957-1958 merupakan Daerah pergolakan akibat adanya pemberontakan PRRI/Permesta sebagai suatu gerakan pemerintah. Selain itu juga Gorontalo dianggap sebagai Daerah yang mewujudkan strategis. Karena pada tahun 1957 Permesta mendirikan sebuah studio yang diberi nama Radio Pemerintah PRRI/Permesta.

Pada tanggal 1 Januari 1958 pimpinan Pemerintah Manado menyatakan di Propinsi SUT (Sulawesi Utara) telah dibentuk jawatan² tingkat propinsi mendahului sesuatu putusan dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Pemerintahan Sulawesi Utara tersebut dipimpin oleh Gubernur H.D. Manoppo, bekas Residen Bolmong. Pangkat Letnan Kolonel [Overste] resmi disandang oleh Daniel J. Somba selaku Komandan KDM-SUT terhitung bulan ini².

Tanggal 17 Februari 1958 terjadi Rapat umum raksasa di Lapangan Sario Manado berlangsung, Letkol D.J. SOMBA selaku Panglima KDM-SUT (Komando Daerah Militer Sulawesi Utara-Tengah) dan Gubernur Militer Permesta di Minahasa mempertajam sikap dengan "memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta". Kemudian oleh Pemerintah Pusat dan tentu saja PKI, gerakan ini disebut sebagai "pemberontakan PRRI/Permesta".

² Sumber digunakan <http://www.permesta.8m.net>, diunduh pukul 10.16 pm, 11/12/2012

Masih Pada tahun 1985 Gorontalo menjadi basis operasi Merdeka II yang bertugas melakukan tekanan fisik kepada Permesta, selain itu tokoh – tokoh masyarakat Gorontalo bersama-sama memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat supaya Gorontalo diberi jatah studio Radio Republik Indonesia.

Pada tahun 2000 RRI Gorontalo yang sebelumnya tergabung dalam lingkungan Departemen Penerangan RI dipisahkan dan digabung dibawah naungan Departemen Keuangan berdasarkan PP No. 37 tahun 2000.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Penyiaran no. 32 tahun 2002 dan PP No. 12 tahun 2005 pada tanggal 18 Maret 2005 RRI berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Gorontalo mengirim 3 orang tenaga persiapan penyiar dilatih di RRI Makassar, yakni Helena Olli (Jabatan Terakhir Mantan Kepala Seksi Reportase RRI Jakarta, sekarang pensiun dan menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta), Nun Eraku (Jabatan terakhir Mantan Kepala Seksi Pemberitaan RRI Gorontalo, sekarang Pensiun), dan Yusuf Panigoro (pindah ke Dinas Perindustrian Gorontalo, sekarang Pensiun). Dalam usaha memperjuangkan kehadiran RRI di Gorontalo, tidak kecil peranan yang diberikan Tokoh Pejuang Nani Wartabone. Bahkan sebagai realisasi dari keputusan Departemen Penerangan/Direktorat Radio Republik Indonesia di Jakarta waktu itu, maka berturut-turut diberangkatkan sejumlah tenaga Detasering sejak tahun 1959 sebagai Tim Pengemban Try Prasetya RRI ke Gorontalo, masing-masing Umar Musada dari Makassar, Subandio dan Sudargo dari Jakarta dan Jusuf Dalimunte dari Bandung. Adapun isi dari Try Prasetya RRI adalah

pertama kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapa pun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan Negara kita. Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimana pun dan dengan akibat apa pun juga. *Kedua* kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada Tanah Air dan Bangsa. *Ketiga* kita harus berdiri diatas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan Persatuan Bangsa dan keselamatan Negara, serta berpegangan pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

5.1.2 Kepemimpinan di RRI Gorontalo.

RRI Gorontalo sejak awal berdirinya yaitu Tanggal 16 Agustus 1959. kepemimpinan RRI saat itu dari rangkaian tim yang dikirim dari Makassar maupun dari Pusat dan kepemimpinan RRI Gorontalo telah dipimpin oleh :

1. S. Dwidjo Atmodjo : Januari 1961 – Agustus 1969
2. YF.P Montong, BA : Agustus 1969 – 10 Juni 1970.
3. Usman Abdullah, A : 10 Juni 1970 – November 1975.
4. Abd. Fattah Siemen : Nop. 1975 – 15 September 1983.
5. H. Rusdi M.Said, BA : 15 Sept. 1983 – 10 November 1988.
6. Denial Narande : 10 November 1988 – April 1989.
7. Ramlah Hiola : April 1989 – 15 Oktober 1990.
8. Drs. Sazli Rais : 15 Oktober 1990 – 22 Januari 1993.
9. Drd. Abu Alim Masyruki : 22 Jan. 1993 – 23 Nop 1995.
10. Drs. Moch. Santosa : 23 November 1995 – 8 Desember 1998.

11. Drs. Muh. Asaad : 8 Desember 1998 – 30 September 2000.
12. Drs. Bagus Edi Asmoro MBA: 30 Sept. 2000 – 13 Agustus 2003.
13. Drs. H. Hadjar : 30 September 2003 – 30 Agustus 2005.
14. Ir. Nelson Sembiring : 30 Agustus 2005 – 15 Maret 2006
15. Sagidin, SE : 15 Maret 2006 – 02 Oktober 2007
16. Drs. Salman : 29 Oktober 2007 – 24 Juni 2009
17. Hasto Kuncoro, SH : 01 September 2009 – 15 Juni 2010
18. H. La Siarama.MM : 15 Juni 2010 s.d 8 Maret 2012.
19. Dra. Sumarlina,MM : 8 Maret 2012 s.d sekarang³

5.2 Peran RRI-Gorontalo Dalam Mengisi Kemerdekaan

Ditilik dari peran RRI dalam memayungi rakyat Indonesia telah melalui sedikitnya tiga era di Indonesia. Di era pasca kemerdekaan, RRI memerankan fungsi vital dalam mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kecepatan informasi adalah aspek penting yang dimiliki radio sebagai moda komunikasi utama pada zaman itu. RRI sebagai radio publik selalu mengakomodasi kepentingan rakyat. Jelas bahwa pada era pasca kemerdekaan peran penting yang diemban oleh RRI adalah penyampaian pesan untuk menjaga dan mengobarkan semangat juang rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Menjadi alat komunikasi dan informasi yang strategis RRI tidak saja berperan menyiarkan dan mendukung konsep wawasan nusantara sebagai suatu keatuan yang utuh dalam mempersatukan bangsa pasca adanya tragedi berdarah

³ *Ibid.*, Tanggal 1 Oktober 2013 hari Selasa pukul 10:35

yang dilakoni Partai Komunis Indonesia. RRI Gorontalo yang menjadi salah satu stasiun radio milik pemerintah dalam konteks RRI sebagai sistem jaringan nasional, selain melakukan produksi siaran lokal, juga memiliki kewajiban relay atas siaran RRI Jakarta, maupun RRI Nusantara di Makassar.

Menyadari pentingnya peran RRI sebagai motor penggerak pembangunan di Gorontalo, maka pemerintah melalui Departemen Penerangan terus berupaya melakukan pembenahan serta peningkatan sarana dan prasarana peralatan pemancar maupun studio, apalagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 101/Kep/Menpen RI/1979 tanggal 7 Juni 1979 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RRI, maka lembaga penyiaran di daerah adat ini menjadi RRI Regional II Gorontalo⁴.

Sebelumnya, peralatan pemancar SW 61,2 berkekuatan 1 KW yang digunakan RRI Gorontalo setelah terbentuk, merupakan pemancar ex. Perang Dunia II milik Angkatan Laut Republik Indonesia dan konon pemancar yang digunakan dalam menyiarkan Detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kemudian diserahkan kepada Gorontalo sebagai penghargaan atas perjuangan tokoh-tokoh pejuang daerah di bawah pimpinan Nani Wartabone dalam membela NKRI.

Aspek Sumber Daya Manusia di RRI Gorontalo menjadi prioritas utama setelah di awal-awal pembentukannya, tidak terdapat kejelasan informasi dan data akurat tentang masalah-masalah kepegawaian. Informasi yang sempat dihimpun

⁴ Azhari Bahariawan Thalib, 2005. *RRI Gorontalo dari masa ke masa*. Liya Grafindo Utama: Jakarta

Tim Penyusun menunjukkan hanya ada 3 orang Penyiar yang dikirim ke Makassar yaitu Nun Eraku, Helena Ollie dan Yusuf Panigoro.

Beberapa bulan setelah RRI Gorontalo terbentuk, meski pada akhirnya hanya Nun Eraku dan Helena Ollie yang diusulkan menjadi Pegawai, sementara Yusuf Panigoro karena suatu alasan pribadi memilih mengundurkan diri dan hijrah ke Departemen Perindustrian. Sementara hampir sebagian besar dari industry belasan orang lainnya berupa tenaga non organik tidak termasuk Tim Teknik dan Siaran yang memang sengaja dikirim oleh Pusat untuk menata dan membangun RRI di daerah ini.

Peningkatan jumlah pegawai di RRI Gorontalo sebagai salah satu Unit Pelaksana Tekhnis Departemen Penerangan. Begitupun dengan kualitas dengan sumber daya manusianya. Tercatat sekitar 90 persen SDM RRI Gorontalo telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi, baik dari aspek teknik, siaran dan pemberitaan hingga pelatihan administrasi. Bukan hanya itu, untuk pelatihan Teknik RRI Gorontalo mendapat bantuan peralatan studio dan pemancar dari luar negeri yaitu dari Siemens dan NEC Jepang, sejumlah teknisi RRI Gorontalo ikut mengenyam pendidikan di Negara-negara itu, bahkan menunjukkan prestasi yang cukup memuaskan.

Masih teringat dibenak kita, ketika sejarah nasional bangsa ini mencatat saat-saat terjadinya coup de etat atau kudeta Partai komunis Indonesia dengan Gerakan 30 September 1965, dimana Letkol Untung bersama pasukannya memanfaatkan Media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan pada saat itu.

Peristiwa tersebut ternyata turut termonitor oleh angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo. Bahkan RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi tersebut kepada pemerintahan daerah tersebut. Sebagaimana diungkapkan Mantan Penyiar RRI Gorontalo Nun Eraku bahwa:

“Saat itu sekitar pukul 19:00 Waktu Indonesia bagian Tengah, saya kebetulan sedang di kantor dan menyiapkan bahan-bahan siaran yang saya asuh., sekaligus menunggu apios tugas dengan Abdul Gias Bahua (yang tengah menyiar) pada pukul 20:00 nanti, di studio RRI Gorontalo saat itu, masing-masing Abdul Gias Bahua yang tengah bertugas menyiar dan Sofyan Polapa sebagai operator, serta Jahja P. Thalib dari pemberitaan dan dirinya sendiri. Saat tengah mengikuti siaran berita pukul 19:30 Wita secara sentral dari Jakarta yang dibacakan oleh Yul Chaidir, tiba-tiba saja siaran tersebut terhenti beberapa saat. Sopi panggil Jahja P.Thalib waktu itu kepada Sofyan Polapa, apa ada gangguan tehnik hingg siaran tiba-tiba terputus?, Tanya Jahja kepada Sofyan yang segera diantisipasi dengan memutar lagu tanpa syair untuk menjaga kevakuman siaran. Gangguan siaran tersebut ternyata hanya beberapa saat. Hanya saja ada suatu pernyataan menarik dalam lanjutan siaran itu, yang ternyata merupakan statemen bahwa Dewan Revolusi yang menjadi istilah waktu itu telah mengambil alih kekuasaan dari apa yang dinamakan Dewan Jendral”.

Dengan melihat pernyataan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa peran RRI Gorontalo dalam menjaga integritas bangsa tidak kalah pentingnya dengan RRI yang ada di pusat. Isu yang dihembuskan oleh Dewan Jendral ternyata sampai juga ke daerah Gorontalo. Isu tersebut ternyata membuat resah masyarakat Gorontalo yang menginginkan adanya suatu perubahan yang tidak terlepas dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. RRI Gorontalo terus memonitoring setiap perkembangan yang ada dengan cara selalu mengabdate informasi melalui siaran-siaran radio. Lebih lanjut Nun Eraku mengatakan bahwa:

“Kepanikan diatasi dengan kesigapan. Itulah barangkali yang dapat diungkapkan dari reaksi para angkasawan RRI Gorontalo waktu itu, yang dengan cepat merekam bahkan mentraskip isi pernyataan dalam siaran tersbut. Kebetulan Gias (Abdul Gias Bahua) sangat trampil dalam steno”.

Kesimpulan yang diambil penulis dari pernyataan diatas adalah dengan banyaknya persoalan yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan memberikan imbas yang besar bagi seluruh wilayah di Indonesia khususnya Gorontalo. Apalagi daerah Gorontalo pada saat itu merupakan daerah yang keamanannya terancam karena adanya pendudukan PERMESTA yang mengancam keutuhan NKRI. RRI Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah pusat berperan dalam penyebaran informasi dengan tujuan agar masyarakat khususnya di daerah Gorontalo tetap terjaga rasa nasionalismenya dan tidak menjadi porak poranda akibat isu-isu yang beredar.

Antara tahun 1950-1958 ada dua masalah kenegaraan yang turut dituntaskan oleh rakyat Gorontalo. pertama pengembalian tentara KNIL. Kedua penumpasan Permesta yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵.

Dari pernyataan diatas penulis menarik kesimpulan pasca pembacaan teks Proklamasi oleh Soekarno-Hatta, disintegrasi terjadi dimana-mana khususnya di Gorontalo. PERMESTA KNIL dan NICA adalah organisasi yang harus ditumpas karena akan mengancam keutuhan Negara. Disinilah peran RRI khususnya RRI Gorontalo dalam menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme. Hal tersebut menandakan bahwa Gorontalo pada saat itu mendaki adanya Negara Republik Indonesia. Disamping itu, dalam mengambil andil yang besar RRI Gorontalo terus bekerja sama dengan RRI yang berada di daerah lain dengan tujuan agar informasi dapat diketahui oleh

⁵ Joni Apriyanto, 2010. *Sejarah Gorontalo Moderen, Perlawanan Kolektif Tahun 1942*. UNG PRESS: Gorontalo. Hlm 56

seluruh masyarakat Indonesia sehingga dengan sendirinya mereka telah menjaga integritas dari bangsa ini karena jiwa nasionalisme telah tertanam di jiwa masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Gorontalo.